

Beberapa minggu terakhir ini, kita menyaksikan amarah umat Islam terhadap Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas pernyataannya yang dianggap mengandung penistaan agama (Islam), khususnya terkait al Qur'an Surat Al Maidah ayat 51. Ujungnya, Jum'at, 4 November 2016 terjadi unjuk rasa besar-besaran di ibukota Jakarta oleh kelompok yang menyebut diri sebagai "Gerakan Pengawal Fatwa MUI". Mereka menuntut pemerintah segera memproses Ahok secara hukum. Bahkan ada yang secara emosional menuntut agar Ahok segera ditangkap. Diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan ribu orang dan dianggap sebagai unjuk rasa terbesar di Indonesia selama ini.

Para pendemo datang berbondong-bondong dari berbagai daerah dengan membawa rasa kebencian terhadap Ahok. Dunia pun menyaksikan peristiwa 4 November 2016 tersebut. Unjuk rasa tidak saja terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, Medan, Makasar, Malang dan sebagainya. Itu menggambarkan bahwa apa yang dilakukan Ahok benar-benar persoalan serius bagi umat Islam.

Menyikapi aksi tersebut, pemerintah tidak bisa melarangnya. Sebab, menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga yang dilindungi undang-undang. Pemerintah hanya bisa menghimbau agar peserta unjuk rasa tertib dan tidak anarkis, sehingga aksi berlangsung damai. Ribuan pasukan dari TNI dan Polri pun dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut agar berjalan damai dan tidak anarkis. Hingga pukul 18.00 WIB sesuai jadwal yang diberikan oleh pihak keamanan, aksi berjalan mulus tanpa insiden sama sekali. Tetapi setelah jam tersebut terjadi beberapa keributan sehingga polisi terpaksa menyemprotkan gas air mata untuk menghalau massa. Ekses dari kerusuhan ini Presiden Jokowi menuding ada aktor-aktor politik yang memanfaatkan momen unjuk rasa untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Bermula dari kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Pramuka, pada 27 September 2016, secara tiba-tiba Ahok di tengah –tengah dialog menyinggung Surat Al Maidah 51, yang selengkapnya berbunyi:

“Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, karena dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem. Itu hak bapak ibu ya. Jadi bapak-ibu perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak

papa..”.

Itulah ucapan Ahok yang sebenarnya dilihat dari konteksnya tidak ada kesengajaan ketika menyebut surat Al Maidah 51. Menurut saya, Ahok hanya kepeleset atau *keceplosan*. Disebut *keceplosan*, karena sebelumnya tidak ada kata atau kalimat yang mengarah ke pembicaraan tentang ayat al Qur'an. Dalam kajian teks/wacana, kata atau kalimat yang sengaja diungkapkan kepada pihak lawan bicara selalu didahului oleh kata atau kalimat sebelumnya untuk membentuk konteks. Waktunya pun hanya berlangsung beberapa saat. Pada saat itu, peserta tatap muka juga tidak ada yang tersinggung, bahkan dari video terlihat beberapa orang tertawa, karena dianggap ucapan Ahok adalah sebuah banyolan atau lelucon.

Dalam komunikasi keseharian, Ahok memang ceplas ceplos. Kata-katanya sering keras, tajam, dan tanpa basa-basi jika mengkritik orang. Selain itu, Ahok sangat temperamental. Dari perspektif ilmu komunikasi, Ahok bukan jenis komunikator yang baik. Terkait itu, saya pernah menulis sebuah artikel di blog berjudul “Andai Ahok Belajar Sociolinguistik”. Saya yakin Ahok tidak sadar bahwa dampak dari ucapannya demikian dahsyat. Energi kita sebagai bangsa seolah terkuras habis gara-gara ucapan itu. Tak satu pun media cetak atau elektronik yang luput memberitakan peristiwa 4 November tersebut, bahkan hingga hari ini.

Hanya beberapa saat usai kunjungannya ke Kepulauan Seribu itu, dengan cepat pernyataan Ahok menyebar luas di media sosial. Banyak yang meminta agar Ahok segera meminta maaf kepada umat Islam. Semula dia enggan, karena mungkin mengira ucapannya biasa-biasa saja. Tetapi setelah melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan semakin banyaknya protes mulai bermunculan, Ahok menyadari kesalahannya. Bertempat di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 10 Oktober 2016, secara terbuka Ahok meminta maaf kepada umat Islam atau siapa saja yang tersinggung atas ucapannya. Ternyata permintaan maaf Ahok tidak serta merta menghentikan amarah umat Islam. Bahkan MUI pada tanggal 12 Oktober 2016 mengeluarkan fatwa melalui Ketua Umumnya, KH. Ma'ruf Amin bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama Islam. Sebelumnya, pada 7 Oktober 2016 dua organisasi melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri.

Fatwa MUI itulah yang menjadi pegangan berbagai kelompok warga muslim untuk melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 4 November 2016 lalu. Pertanyaannya ialah mengapa warga

tetap marah dan menuntut Ahok segera diproses secara hukum, padahal dia sudah meminta maaf? Mengapa amarah masyarakat muslim begitu memuncak seolah tidak ada ampun bagi Ahok? Dua pertanyaan itu penting untuk dibahas lewat tulisan ini.

Pertama, dalam perspektif filsafat bahasa, ucapan yang sudah keluar tidak akan pernah bisa ditarik. Seorang filsuf bahasa kenamaan dan paling berpengaruh di abad ke-20 kelahiran Wina, Austria, bernama Wittgenstein secara lebih ekstrim mengatakan bahwa sebuah kata yang sudah terlanjur dilempar ke ruang publik tidak akan pernah bisa ditarik kembali oleh tujuh kuda sekalipun. Itu artinya ucapan tidak pernah bisa dihapus, berbeda dengan tulisan, terlebih kata-kata kasar yang menyakiti hati. Bekasnya tidak akan pernah hilang. Atas dasar pemikiran itulah sangat bisa dipahami walau Ahok telah meminta maaf, amarah masyarakat tetap menyala.

Kedua, dari sisi makna kata yang diucapkan Ahok. Menurut Wittgenstein makna sebuah kata adalah penggunaannya dalam kalimat, makna sebuah kalimat adalah penggunaannya dalam bahasa, dan makna dalam bahasa ialah penggunaannya dalam konteks kehidupan manusia. Dari perspektif tersebut, makna kalimat yang diucapkan Ahok hanya beberapa detik itu sebenarnya sangat sepele, yakni hanya ingin memastikan bahwa program dia sebagai gubernur tetap jalan hingga Oktober 2017. Dengan kata lain, Ahok tidak bermaksud melakukan penistaan agama. Beberapa kali dia membantahnya. "Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa", kata Ahok ketika menyampaikan permohonan maaf.

Tetapi karena secara kebetulan Ahok merupakan anggota masyarakat minoritas baik dari sisi agama (Kristen), dan etnik (Cina atau Tionghoa) yang memimpin warga yang mayoritas muslim, maka beragam tafsir terhadap ucapannya tidak bisa dihindari. Kebencian sebagian masyarakat terhadap kebijakan Ahok tidak muncul tiba-tiba. Mereka yang merasa sebagai korban kebijakan Ahok, terutama program penggusuran, menyimpan dendam kesumat. Ditambah lagi kesenjangan ekonomi penduduk pribumi dan warga Tionghoa yang semakin lebar juga menambah kebencian warga terhadapnya. Program penggusuran Ahok menimbulkan isu sensitif di masyarakat bahwa warga atau penduduk pribumi diusir dari tanah kelahirannya, sedangkan kaum pendatang keturunan Tionghoa semakin leluasa menguasai berbagai aset.

Jika dilihat dari perspektif wacana, pernyataan Ahok bukan peristiwa linguistik semata, tetapi juga politik dan agama. Secara politik sangat sulit memisahkan aksi 4 November dari agenda Pilkada DKI. Di saat dialog tersebut, Ahok terpeleket secara linguistik. Kendati tiba-tiba, ucapan Ahok tidak bisa lepas dari konteks Pilkada yang dia ikuti. Sebab, sebuah teks tidak akan pernah muncul atau hadir sendirian, selalu ada konteks yang mengitarinya.

Pada ranah kontestasi Pilkada DKI, para lawan politik Ahok tentu memanfaatkan kesalahan ucapannya sebagai senjata ampuh untuk menjatuhkannya. Dengan gaya liarnya berkomunikasi, Ahok seolah tidak sadar dia itu siapa. Dia adalah seorang gubernur/pemimpin yang tindakannya, termasuk ucapannya, selalu menjadi perhatian publik. Ahok seolah tidak tahu atau lupa sudah berapa banyak pemimpin jatuh bangun karena ucapannya. Kita belum tahu apakah Ahok akan jatuh dari ucapannya. Yang pasti saat ini Ahok tidak bisa berkonsentrasi kampanye secara penuh karena harus menghadapi persoalan hukum yang menjeratnya.

Dilihat dari sisi agama, sangat bisa dipahami jika protes warga muslim begitu keras karena Ahok memasuki wilayah sangat sensitif, yakni agama. Setiap tindakan atau ucapan diskriminatif menyangkut golongan, identitas diri dan agama (SARA) merupakan pelecehan terhadap harga diri dan hak dasar yang melekat pada manusia. Kita juga tidak tahu bagaimana akhir dari "kisah politik" Ahok. Tampaknya episodanya masih akan panjang. Sebab, pernyataan Ahok mengandung banyak dimensi, mulai politik, sosial, hukum, agama, dan bahasa.

Ada pelajaran berharga dari kasus Ahok. Pertama, berbicara santun dan menghargai lawan bicara sangat penting untuk membangun relasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, ketika seseorang menjadi pemimpin, sebenarnya sebagian kebebasannya telah hilang, termasuk kebebasan berbicara seenaknya. Ketiga, kata atau ucapan kasar dan menyakitkan melahirkan kekerasan simbolik yang eksesnya sangat dahsyat sebagaimana kita saksikan hari-hari ini. Keempat, seorang pemimpin sangat penting untuk berbicara sebatas yang dia kuasai. Ahok jelas bukan ahlinya dan tidak punya otoritas untuk berbicara tentang agama (Islam), apalagi dia non-muslim. Kelima, pemimpin adalah representasi masyarakat yang dipimpinya. Masyarakat kita yang semakin beradab tentu menginginkan pemimpin yang tidak saja arif dalam bertindak, cermat dalam bekerja, tetapi juga santun dalam bertutur kata. Dalam hal ini Ahok gagal memenuhinya. Tampaknya Ahok harus melalui jalan terjal untuk bisa menduduki lagi DKI 1. Kita tunggu peristiwa apa yang akan terjadi sambil mencari hikmah dari semuanya!

---

Jakarta, 8 November 2016